



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG),
DAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS))**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 Februari 2026
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.23 WIB s.d 13.55 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: 1. Membahas Hapsem BPK RI Semester II Tahun 2024. 2. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2025. 3. Membahas Program Kerja TA 2026
Ketua Rapat	: Roberth Rouw
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.23.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah Membahas Hapsem BPK RI Semester II Tahun 2024, Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2025, dan Membahas Program Kerja TA 2026.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian Perhubungan dalam percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 serta peningkatan kualitas pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2025, termasuk optimalisasi realisasi belanja dan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguatan pengawasan, serta peningkatan kinerja pada 8 Indikator Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas layanan transportasi nasional.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan atas capaian serapan APBN TA 2025, dimana capaian per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
Kementerian Perhubungan	88,88 %	91,25 %

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan diminta untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap hambatan yang dihadapi, dengan mengacu pada rekomendasi, saran dan masukan Komisi V DPR RI.

3. Komisi V DPR RI mendukung Program Kerja Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2026 melalui pelaksanaan program Dukungan Manajemen, Infrastruktur Konektivitas, dan Pendidikan Vokasi, serta pengutamaan anggaran untuk pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun 2026, antara lain; Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pada Proyek Strategis Nasional, Pembayaran Stimulus Ekonomi (Diskon Tarif Transportasi), Percepatan Rehabilitasi di Wilayah Bencana Sumatera, dan Dukungan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, untuk meningkatkan keselamatan, konektivitas, dan pemerataan akses transportasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.55.WIB.

Jakarta, 18 Februari 2026

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

KETUA RAPAT,

ttd

ROBERTH ROUW